

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abbas Salim, 1993, "*Manajemen Transportasi*", Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Bambang Sugono, 2007, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Sinar Grafika, Jakarta;
- E. Utrecht, 1990, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet ke-9 disadur dan direvisi oleh Moh. Djindang*". Balai Buku Ichtiar. Jakarta;
- Edy Hidayat, 2009, "*Refrensi Kepelabuhanan Seri 06 Alat Bantu Navigasi Kepelabuhanan*", Surabaya;
- Herman Budi Sasono, 2015, "*Managemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*", CV Andi Offset, Yogyakarta;
- I Made Arya Utama, N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge yang disunting Philipus M.Hadjon, 1993, "*Pengantar Hukum Perizinan*;
- Johnny Ibrahim, 2005, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia Publishing, Jawa Timur;
- Kartini, Kartono, 1983, "*Pengantar Metodologi Research*", Alumni, Bandung;

Latief Adam dan Inne Dwiastuti, 2015, "*Membangun Proses Maritim Melalui Pelabuhan*", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Pudjiastuti, S, 2016, "*Surat Badan Reformasi Geospasial No:B-3.4/SESMA/IGD/07/2004 Direktorat Jendral PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*", dalam Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di Bidang Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Universitas Diponegoro, Semarang;

Ridwan HR, 2003, "*Hukum Administrasi Negara*", UII Press, Yogyakarta;

Soemitro, 1998, "*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta;

Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali, Jakarta;

Suyono, 2007, "*Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut Edisi IV*", Jakarta;

Tjetjep Karsafman, 2004, "*Pengenalan Terminal Khusus, Curah dan Pengoperasiannya*", Jakarta;

Internet/Jurnal Ilmiah :

Aswan Hasoloan, "*Sistem dan Prosedur Operasional Palayanan Kapal dan Barang Berbasis Online Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan*", Vol. III No. 2, Jurnal Publik UNDHAR Medan, Medan;

Auwjong, Peng Koen & Sugiantoro R. B, 2005, "*Perang Eropa*", Vol. 3, Buku Kompas, Jakarta;

- Budiyono Doel Rachman, 2017, "*Konsesi Pelabuhan di Indonesia (Regulasi & Perkembangannya)*", IPC, Diakses pada 13 Februari 2021, <http://pml.i.co.id/wp-content/uploads/Panel-2c-Budiyono-Doel-Rachman-Konsesi-Pelabuhan-Indonesia.pdf>;
- Sekolah Tinggi Maritim, "*BAB II Tinjauan Pustaka*", Diakses pada 13 Februari 2021, <http://repository.stimart-amni.ac.id/784/2/BAB%202.pdf>;
- Wikipedia, "*Konsesi*", Diakses pada 12 Februari 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsesi>;
- Ika Citra Sari, 2016, "*Peranan Approaching Time Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Pemanduan Kapal di Pelabuhan Utama Tanjung Priok*", Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 7 No.2, Jakarta;
- Kementerian Perhubungan Indonesia, 2021, "*Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat*", Diakses pada 14 Februari 2021, http://dephub.go.id/public/perizinan_assets/files/posts/d53e4434b557473beb6ed0eb9c171d9b.pdf;
- Oblak R., Bisticic A., & Jugovic A, 2013, "*Public-Privat Partnership-Management Model of Croatian Seaports*", Management, 18(1);
- Putra, A. A dan Djalante S, "*Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*", Jurnal Ilmiah Media Engineering. 6 (1);
- Thresa Sandra Desfika, 2019, "*Tarik Investasi, Perjanjian Konsesi Pelabuhan Harus Dipatuhi*", Diakses pada 12 Februari 2021,

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/569419/tarik-investasi-perjanjian-konsesi-pelabuhan-harus-dipatuhi;>

Wijoyo PH, 2012, “*Tinjauan Umum Pelabuhan Sebagai Prasarana Transportasi*”, Diakses pada 06 Februari 2021,
[http://e-journal.uajy.ac.id/159/3/2TA12921.pdf;](http://e-journal.uajy.ac.id/159/3/2TA12921.pdf)

Winoto Hadi, 2010, “*Analisis Jumlah Kapal Di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Berdasarkan Nilai Layanan Kapal Pandu*”, Vol. III No.1,
Jurnal Logistik D III Transportasi UNJ;

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-12/PP008 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Penyediaan Tenaga Listrik PLTU Kepada PT. Bhumi Jati Power di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-611/PP008 Tahun 2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati B Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP 275 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati B di Desa

Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.471/DJPL/2019 tentang Pemberian Pelimpahan Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT. Krakatau Bandar Samudera Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaaan Pada Wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 81 Tahun 2019 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 309 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Krakatau Bandar Samudera Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 402 Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati B PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 444 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Penyedia Tenaga Listrik PLTU PT. Bhumi Jati Power di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 599 Tahun 2012
tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Krakatau Bandar
Samudera Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan
Pada Perairan Wajib Pandu Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati B
PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 57 Tahun 2015
tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

